

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hasil sensus penduduk baru-baru ini menyadarkan bangsa kita akan masalah-masalah demografi di Indonesia. Dengan penduduk berjumlah 147,5 juta dan laju pertumbuhan 2,32% tiap tahun pada bulan oktober 1980. Indonesia masih berada di urutan kelima di antara bangsa-bangsa di dunia dilihat dari jumlah penduduknya. Demikian pula, hampir tidak ada perubahan dalam ketidak merataan penduduk yang telah berlangsung setidak-tidaknya selama dua abad.¹

Tidak mengherankan jika para perencana ditingkat nasional masih menganggap program transmigrasi sebagai cara untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk yang berlebihan di Jawa meskipun tetap diakui pentingnya program keluarga berencana sebagai kebijaksanaan jangka panjang yang menyangkut masalah kependudukan.²

Pertanian merupakan titik awal dari pertumbuhan daerah pemukiman transmigrasi, dengan sendirinya pula usaha pertanian harus diselesaikan dengan pola kondisi dan kapabilitas tanah yang ada. Karena pola usaha tani tiap daerah yang satu dengan daerah yang lain tidak sama, maka pola pembinaan dan penyuluhan pun juga harus disesuaikan dengan keadaan lingkungan, kebutuhan petani serta potensi institusional yang ada di daerah-daerah.³

¹ J. Hardjono, Transmigrasi dari Kolonisasi sampai swakarsa, Gramedia, Jakarta, 1982. hlm. 1

² J. Hardjono, Ibid, hlm.1.

³ Prodjosuhardjo, Mudjijo, Usaha Tani dan Penyuluhan, Yogyakarta, Universitas Sumatera Utara, 1979, hlm. 10

Program transmigrasi mulai dirintis oleh pemerintah Belanda sejak November 1905 di Gedong Tataan (Lampung) di pimpin oleh U.G. Heysting (Asisten Residen Sukabumi) dalam rangka program kolonisasi, pada zaman kemerdekaan program kolonisasi dilanjutkan dengan nama transmigrasi.⁴

Masalah utama yang terlihat sejak dulu sampai sekarang adalah mitos dan orientasi berpikir tradisional yang telah menguasai pengarahannya kebijaksanaan transmigrasi, bahwa peranan transmigrasi adalah sebagai obat mujarab untuk menyelesaikan kepadatan penduduk dan kemelaratan/kemiskinan.⁵

World Bank (1990) melaporkan bahwa dalam tiga dekade terakhir ini negara berkembang telah berhasil dalam memajukan ekonominya. Hal ini secara jelas diperlihatkan oleh adanya *trend* yang berkaitan dengan meningkatnya pendapatan dan konsumsi rata-rata masyarakat negara berkembang. Menurut laporan tersebut, konsumsi per kapita negara berkembang telah meningkat sekitar 70 persen dalam periode waktu 1865 dan 1985. Demikian pula halnya dengan ukuran kesejahteraan lainnya seperti harapan hidup, tingkat kematian bayi, dan tingkat pendidikan memberikan gambaran tentang adanya perbaikan yang berarti selama ini.⁶

Dibalik kesuksesan pembangunan ekonomi yang selama ini telah diraih, World Bank (1990) juga melaporkan bahwa lebih dari satu milyar orang di negara yang sedang berkembang masih ada dalam kemelut kemiskinan, yaitu mereka yang mempertahankan hidupnya dengan kapasitas pengeluaran kurang dari US\$ 370

⁴ Swasono, Sri Edi, Memperingati tiga perempat abad tranmigrasi di Indonesia, dapatkah kita mengubah orientasi berpikir lama, Sinar Harapan, 18 Nov 1980, hlm:5. Kol: 3-9.

⁵ Swasono, Sri Edi, Ibid. hlm :5 Kol : 3-9.

⁶ World Bank, World Development Report, Oxford University Press, Newyork, 1990. hlm. 1.

dalam setahun. Hal ini mencerminkan bahwa kemiskinan masih tetap merupakan permasalahan serius dalam pembangunan.⁷

Melalui pembangunan ekonomi, Indonesia telah berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Keberhasilan Indonesia telah diakui bukan hanya dalam hal peningkatan pendapatan rata-rata melainkan juga dalam hal pengurangan jumlah penduduk miskin. Menurut BPS (1993) antara periode 70-an dan 80-an Indonesia telah berhasil menurunkan jumlah golongan miskin dari 65 persen menjadi kurang dari 17 persen dari total populasi.⁸

Keberhasilan ini tentu saja tidak boleh ditafsirkan bahwa kemiskinan di Indonesia sudah tidak menjadi suatu permasalahan penting yang perlu mendapat perhatian lebih. Menurut data SUSENAS tahun 1993, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih sekitar 25,9 juta jiwa.⁹

Kenyataan ini bukan hanya telah lama disadari oleh pemerintah Indonesia, tetapi juga upaya mengatasi kemiskinan ini telah lama digariskan dalam kebijaksanaan pembangunan di Indonesia. Hal ini diperlihatkan oleh perubahan dalam Trilogi Pembangunan dimana aspek pemerataan menempati urutan pertama (sebelumnya pertumbuhan) yang kemudian diikuti oleh kebijaksanaan Delapan Jalur Pemerataan. Selanjutnya, dalam tahun anggaran 1991/1992 upaya dalam mengatasi

⁷ World Bank, *Op cit.*, hlm. 1

⁸ BPS, *Desa Miskin, Penjelasan dan Metodologi*, BPS, Jakarta, 1993, hlm. 1.

⁹ BPS, *Ibid.*, hlm. 1.

kemiskinan menempati tempat khusus yang diprioritaskan. Departemen pertanian pada tahun anggaran tersebut telah menyediakan dana sebesar Rp 45 milyar untuk menanggulangi kemiskinan di 17 propinsi di Indonesia.¹⁰

Mengangkat kemiskinan menjadi suatu prioritas pembangunan merupakan hal yang sangat tepat. Pembangunan yang tidak dikaitkan dengan masalah kemiskinan akan membuka peluang munculnya permasalahan-permasalahan jangka pendek dan jangka panjang yang akan membahayakan proses dan keberlanjutan pembangunan itu sendiri. Yang perlu ditekankan adalah bahwa permasalahan pengurangan kemiskinan lebih merupakan kebijaksanaan pembangunan jangka panjang daripada kebijaksanaan jangka pendek. Oleh karena itu, kebijaksanaan harga, misalnya, kebijaksanaan yang populer dikalangan ekonomi, dengan mengasumsikan bahwa faktor lain seperti kelembagaan, teknologi, dan sumberdaya tidak berubah, lebih tepat dipandang sebagai kebijaksanaan jangka pendek. Karena sifatnya itu, maka kebijaksanaan tersebut tidak begitu efektif digunakan untuk mengurangi kemiskinan.¹¹

Kemiskinan pada umumnya disebabkan oleh dua hal utama yaitu : (i) *market failure* dan (ii) *political failure*. *Market Failure* terjadi apabila sebagian besar kelompok miskin termasuk dalam angkatan kerja (*labor force*) memperoleh upah yang tidak mencukupi kebutuhan dasar (pangan, sandang, kesehatan, pendidikan) mereka. Adapun *political failure* terjadi apabila struktur politik-ekonomi yang ada telah menyebabkan distorsi dalam penyampaian kepentingan kelompok miskin.

¹⁰ Hermanto, A.Pakpahan, M.H.Sawit, A.H.Taryoto, A.Zulham dan H.P.Saliem, Kemiskinan Di Pedesaan : Masalah Dan Alternatif Penanggulangannya. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian, Bogor, 1995, hlm. 2.

¹¹ Hermanto, A.Pakpahan, M.H. Sawit, A.H.Taryoto, A.Zulham dan H.P.Saliem, Ibid. hlm. 2.

Kombinasi keduanya akan lebih memperparah keadaan dan lebih mempersempit ruang- gerak untuk mengatasi masalah kemiskinan ini.¹²

Dalam rangka untuk mengatasi penyebaran penduduk yang tidak merata, maka pemerintah mengambil suatu tindakan yaitu dengan cara menempatkan penduduk melalui program Transmigrasi. Dengan program ini diharapkan masalah penyebaran penduduk yang tidak merata dapat diatasi sekaligus dapat meningkatkan tingkat pendapatan penduduk yang cukup rendah. Untuk mengetahui lebih jelas tingkat pendapatan masyarakat transmigrasi tersebut maka perlu dilakukan penelitian secara ilmiah.

Untuk melihat lokasi tranmigrasi di beberapa Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Lokasi Transmigrasi di Beberapa Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara Tahun 2000

No	Kabupaten	Jumlah	
		KK	Jiwa
1	Langkat	900	4.428
2	Labuhan Batu	2.700	10.664
3	Dairi	484	2.295
4	Tapanuli Utara	275	1.275
5	Tapanuli Tengah	4.064	18.565
6	Tapanuli Selatan	19.723	77.681
7	Nias	28.221	115.248

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tingkat I Sumatera Utara, 2000

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan salah satu lokasi transmigrasi terbesar ketiga di propinsi Sumatera Utara dengan jumlah 4.064kk dan 18.565 jiwa pada tahun 2000.

¹² Hermanto, A.pakpahan, K.M.H.Sawit, A.H.Taryoto, A.Zulham dan H.P.Saliem. Opcit. hlm. 2.

Untuk melihat lokasi Transmigrasi di beberapa Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah di Propinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel. 2 . Lokasi Transmigrasi di Beberapa Kecamatan/Desa di Kabupaten Tapanuli Tengah di Propinsi Sumatera Utara Tahun 2000

No	Kecamatan	Desa	Penempatan Tahun	Jumlah		Keterangan
				KK	Jiwa	
1	Barus	Manduamas I	1982/1983	500	2.345	Sudah diserahkan
		Manduamas II	1982/1983	500	2.419	Sda
		Manduamas III	1983/1984	500	2.825	Sda
		Manduamas IV	1986/1998	1.014	3.651	Sda
2	Lumut	Lumut	1983/1984	150	866	Sda
3	Kolang	Rawa Kolang I	1996/1997	300	1.442	Sda
		Rawa Kolang II	1996/1998	300	1.279	Sda
		Rawa Kolang III	1999/2000	150	804	Masih dibina
4	Sibabangun	Pulo Pakkat I	1995/1997	320	1.026	Sudah Diserahkan
		Pulo Pakkat II	1996/1997	230	1.198	Masih dibina

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tingkat I Sumatera Utara, 2000.

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa Desa UPT Rawa Kolang III Kecamatan Kolang merupakan salah satu lokasi Transmigrasi yang masih dibina oleh pemerintah yaitu dengan jumlah 150 KK dan 804 Jiwa pada tahun 2000.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian yaitu sebagai berikut :

- a). Bagaimana pengaruh faktor ekonom(jumlah tanggungan, curahan tenaga kerja, total biaya produksi dan total pendapatan keluarga) terhadap pendapatan perkapita warga transmigrasi ditinjau dari garis kemiskinan di daerah penelitian.
- b). Bagaimana pengaruh faktor sosial (umur, tingkat pendidikan, pengalaman berusahatani) terhadap pendapatan perkapita warga transmigrasi di tinjau dari garis kemiskinan di daerah penelitian. .

- c). Bagaimana kontribusi pendapatan keluarga dari usahatani dan non usahatani terhadap total pendapatan keluarga warga transmigrasi di daerah penelitian.
- d). Bagaimana tingkat pendapatan warga transmigrasi di daerah penelitian.
- e). Masalah apa yang dihadapi warga transmigrasi di daerah penelitian.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a). Untuk mengetahui pengaruh faktor ekonomi (jumlah tanggungan, curahan tenaga kerja, total biaya produksi dan total pendapatan keluarga) terhadap pendapat perkapita warga transmigrasi di daerah penelitian.
- b). Untuk mengetahui pengaruh faktor sosial (Umur, tingkat pendidikan, pengalaman berusahatani) terhadap pendapatan perkapita warga transmigrasi di daerah penelitian.
- c). Untuk mengetahui kontribusi pendapatan keluarga dari usahatani dan non usahatani terhadap total pendapatan keluarga warga transmigrasi di daerah penelitian.
- d). Untuk mengetahui tingkat pendapatan warga transmigrasi di daerah penelitian
- e). Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi warga transmigrasi di daerah daerah penelitian.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a) Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan penelitian ini.
- b) Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan yang dianggap perlu untuk diperbaiki.
- c) Sebagai bahan penulis skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara.